



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**P-ISSN : 2621-0312**

**E-ISSN : 2657-1560**

**Vol. 8, No. 1 Tahun 2025**

**DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v8i1.28854>**

---

## **Kepemimpinan Walikota Independen dalam Perspektif Kaidah *Tasharruf Al- 'Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Mashlahah***

**Nadirsah Hawari**

Universitasi Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia  
nadirsahhawari@radenintan.ac.id

**Agustam**

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia  
dmstour68@gmail.com

**Muntaha Artalim**

International Islamic University of Malaysia, Gombak, Malaysia  
muntaha@iium.edu.my

Submitted: September 05<sup>th</sup>, 2024

Revised: January 03<sup>th</sup>, 2025

Accepted: July 02<sup>th</sup>, 2025

### **Abstract**

*This paper aims to capture a local leadership phenomenon exemplified by a Mayor-Deputy Mayor duo who won the regional election (Pilkada) through an independent route and earnestly endeavored to implement the principle of "tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah" (the actions of a leader towards their people must be oriented toward public welfare). This discussion is considered important and intriguing, as the victory of Wahdi-Qomaru represents an anomaly in Metro's political process. The main issue addressed in this study is the extent of Wahdi-Qomaru's efforts to implement the practical application of the principle above, using four key indicators: refusing to compete through political party channels, remaining focused on welfare-intensive agendas even if deemed unpopular and lacking political imagery, declining to serve as party officials after assuming office, and fulfilling campaign promises by achieving tangible accomplishments. This research employs a qualitative approach with a thematic descriptive analysis method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The data were processed and analyzed in-depth to produce findings and contribute new insights to the field. The study finds that Wahdi-Qomaru successfully created a distinctive and impactful political practice model through an independent approach, particularly in their political*

*communication strategy. Their political independence positively influenced their leadership style, which remained harmonious and communicative with political elites and local government partners. Furthermore, they have accomplished numerous things, particularly in governance.*

*Keywords: Principle, Tasharruf al-Imam, Welfare, Independent Mayor*

### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba memotret sebuah fenomena kepemimpinan lokal dari seorang Walikota-Wakil Walikota yang menang pilkada melalui jalur independen dan upaya sungguh untuk mengimplementasikan kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyah manuthun bi al-maslahah*” (tindakan seorang penguasa atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan). Pembahasan ini dipandang penting dan menarik mengingat kemenangan Wahdi-Qomaru merupakan sebuah anomali proses politik di Metro. Permasalahan utama kajian ini adalah sejauhmana upaya yang dilakukan Wahdi-Qomaru untuk menerapkan praktik nyata dari kaidah diatas dengan mengacu pada empat indikator utama yaitu menolak maju kontestasi melalui jalur partai, tetap fokus pada agenda padat masalah walaupun dianggap tidak populis dan minim citra politik, enggan menjadi pengurus partai setelah menjabat dan mewujudkan janji kampanye dengan mengukir prestasi kerja. Penelitian ini berupa riset kualitatif dengan metode analisis deskriptif tematik dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentatif. Data diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan temuan sekaligus kebaharuan penelitian. Hasil penelitian mendapati bahwa Wahdi-Qomaru dinilai berhasil membuat role model praktik politik yang unik dan berkesan dengan model pendekatan kemandirian terutama di jalur komunikasi politik. Kemandirian politik Wahdi-Qomaru berdampak baik pada corak kepemimpinan mereka berdua yang tetap harmonis dan komunikatif terhadap para elit partai dan mitra pemerintah daerah sekaligus berhasil mengukir banyak prestasi dan capaian terutama pada tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: Kaidah, Tasharruf al-Imam, Masalah, Walikota Independen

### **Pendahuluan**

Ada 67 pasangan calon independen yang maju pada pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020 dari total 734 calon yang terdaftar di KPU secara keseluruhan (Syambudi, 2020). Dari 67 calon independen tersebut hanya 6 pasangan calon yang menang yaitu; pasangan Romi Hariyanto-Robby Nahliyansyah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pasangan Wahdi-Qomaru Zaman di Kota Metro, Lampung, pasangan Syamsul-Hendra di Rejang Lebong, Bengkulu, pasangan Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pasangan Hendrik Syake

Mambor-Andarias Kayukatui di Teluk Wondama, Papua Barat, dan Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom di Fakfak, Papua Barat dengan total persentase 8,8% seperti dituturkan oleh Ketua KPU RI (Adhitia, 2020). Rendahnya angka keberhasilan tersebut disinyalir pengamat karena lemahnya jaringan kandidat sehingga mesin politik sulit bergerak, keterbatasan sumber daya politik yang bisa digerakkan karena semua kandidat sudah memiliki kavlingan masing-masing dan yang terakhir paradigma umum publik yang terbangun dimana jika ingin menang maka harus lewat jalur politik dan diusung partai politik.

Kemenangan pasangan calon nomor urut 1 (Wahdi-Qomaru) mengagetkan banyak pihak mengingat keduanya minim pengalaman di birokrasi pemerintahan apalagi panggung politik praktis. Bagi Wahdi-Qomaru, ini adalah momentum medan jihad baru yang tidak mudah apalagi para kompetitor adalah tokoh politik berpengalaman, mengakar di masyarakat, didukung parpol penguasa parlemen dan memiliki amunisi politik. Rival mereka berdua adalah pasangan calon nomor urut 2 (Mufti-Saleh) didukung oleh PKS dan Nasdem, pasangan calon nomor urut 3 (Ampian-Rudy) didukung partai pemenang pemilu Metro yaitu Golkar, dan pasangan calon nomor urut 4 (Anna-Fritz) didukung partai PDIP, Demokrat, Gerindra dan PPP.

Tabel 1. Peta Kekuatan Dukungan Parpol Terhadap Paslon\*

| No. Paslon | Pasangan Calon | Jumlah Suara Partai Pengusung | Jumlah Kursi Partai Pengusung | Keterangan  |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1          | Wahdi-Qomaru   | -                             | -                             | Jalur Independent                                       |
| 2          | Mufti-Saleh    | 27.293 suara                  | 7 kursi                       | PKS-Nasdem  |
| 3          | Ampian-Rudy    | 29.210 suara                  | 10 kursi                      | Golkar, PAN, PKB  |
| 4          | Anna - Fritz   | 39.896                        | 8 kursi                       | PDIP-Demokrat-Gerindra-PPP (Gerindra dan PPP nol kursi) |

\*Sumber data diolah dari berbagai sumber terutama KPUD Kota Metro

Sajian data pada tabel diatas menggambarkan bahwa secara teori dan kekuatan politik di lapangan pasangan Ana-Fritz lebih diunggulkan daripada pasangan lainnya apalagi paslon independen. Bedanya, pilkada Kota Metro tahun 2020 adalah strategi dan kekuatan tim sukses dan daya tahan tim yang utuh sehingga calon independenpun memiliki kesempatan yang sama untuk bertemu bahkan menjalin hubungan emosional dengan calon pemilih ditambah masyarakat juga sudah tidak begitu yakin dengan calon partai.

Wahdi-Qamaru meyakini bahwa ikut serta kontestasi pilkada melalui jalur independen sama legalnya dengan jalur partai karena keduanya telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 ayat (2) dinyatakan “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) (Perludem, 2017).

Pasca pemungutan suara pilkada serentak Kota Metro tanggal 9 Desember tahun 2020 calon independen (Wahdi-Qamaru) menang dan mampu mengalahkan perolehan calon-calon yang diusung partai politik. Pasangan calon nomor urut 1 (Wahdi-Qamaru) mendapatkan perolehan suara 29,2% disusul terbanyak kedua diraih pasangan calon nomor urut 4, Anna Morinda–Fritz Akhmad Nuzir sebanyak 27,6% dan diurutan ketiga pasangan calon nomor urut 3, Ampian Bustami–Rudy Santoso sebanyak 23,2% dan yang terakhir pasangan calon nomor urut 4 Ahmad Mufti Salim–Saleh Chandra sebanyak 20,0%.

Unggulnya calon perseorangan atas dominasi partai politik dianggap sebagai fenomena baru di Lampung terutama Kota Metro. Pengamat politik dan akademisi asal Metro, Oki Hajiansyah Wahab mengatakan kemenangan pasangan calon perseorangan ini cukup mengejutkan banyak pihak. Menurutnya, kinerja tim pemenangan yang menyatu dengan ketidakpuasan warga atas kinerja partai politik dan para kadernya di parlemen selama ini terakumulasi menjadi dukungan terhadap calon independen yang kebetulan juga memiliki sumber daya yang cukup (Purna Jaya, 2020).

Sudah tiga tahun lebih Wahdi-Qomaru memimpin Kota Metro sejak pertama kali dilantik pada tanggal 26 Januari 2021. Wahdi-Qomaru terlihat begitu solid dan akur dalam memulai karir kepemimpinan mereka berdua di Kota Metro. Dalam banyak acara, keduanya kerap tampil bersama seakan ingin memberi pesan kepada para pejabat, elit partai, politisi dan warga Metro bahwa keduanya memang sepasang dan sehati untuk memajukan Kota Metro dengan slogan Metro Ceria dan siap menunaikan janji-janji politik saat berkampanye. Namun begitu, ada pengamat dan politisi yang menilai selama tiga tahun kepemimpinan Wahdi-Qomaru (2023) belum ada perubahan memadai, terutama pembangunan fisik yang sempat dijanjikan sebelumnya. Jalan-jalan di kota Metro masih banyak berlubang, tergenang air ketika hujan dan gelap, pembangunan masih bersifat sporadik dan belum sesuai agenda sembilan program unggulan Wahdi-Qomaru hingga pertengahan tahun 2023. Hal ini memang tidak mudah mengingat Wahdi-Qomaru adalah Kepala daerah yang berkuasa melalui jalur independen yang menurut Agus ada faktor penghambat dan penghalang besar baginya yaitu kekuatan legislatif lokal (Santoso, 2017). Hal senada dikatakan Zubair, bahwa kepala daerah independen adalah pemain tunggal yang tidak mudah berhadapan dengan gaya politik para anggota DPRD yang merupakan mitra strategis bagi keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya (Hawari, 2020). Dalam satu wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kota Metro Ahmad Khusaini, dia juga membenarkan bahwa pada masa awal-awal kepemimpinan Wahdi-Qomaru di Metro ada upaya konstruktif dari politisi di DPRD Kota Metro yang dinilai menyulitkan langkah Wahdi-Qomaru untuk sukses memimpin Kota Metro

terutama terkait anggaran dan pengelolaan pembangunan yang ada saat ini (Ahmad Khusaini, 2022).

Kajian tentang kepala daerah independen bukanlah satu pembahasan baru karena sudah ada beberapa riset terdahulu yang mencoba menelaah rimba kekuasaan kepala daerah melalui jalur independent. Diantaranya Pratikno dengan judul ‘Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol’ yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2007. Disini penulis membahas tentang wacana majunya calon independen dalam pilkada dan wacana ini sudah terjawab dengan munculnya undang-undang pilkada. Kedua, Agus Budi Santoso yang berjudul “Eksistensi dan Problematika Calon Independen dalam Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”. Budi menjelaskan ada tiga kendala utama bagi seorang kepala daerah independen yaitu, sulitnya mengumpulkan dukungan politik, tingginya political cost dan tidak mudahnya menjaga keseimbangan kekuasaan dengan kekuatan legislatif di DPRD. Ketiga, “Pemilihan Kepala Daerah Bagi Calon Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis Zubair. Menurutnya, ada empat masalah krusial yang dihadapi seorang calon independen dalam pilkada diantaranya besarnya jumlah persyaratan dukungan, besarnya biaya politik untuk menggerakkan mesin kampanye, sulitnya membuat tim yang solid, dan adanya pembangkangan dari calon pemilih yang sudah memberikan dukungan di awal pencalonan (Zubair, 2021). Dari kesemua kajian terdahulu, kajian yang dijalankan peneliti memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda terutama pada objek material berupa ruang lingkup kajian politik lokal yang unik seperti Kota Metro yang digambarkan sebagai kepala daerah berterah ulama dan ahli agama, yang berkuasa pada satu wilayah kecil, unik, kota pendidikan namun saat pilkada dan pemilu marak praktik money politik seperti yang ditegaskan oleh Rakata Institut.

Telaah terhadap data-data empiris diatas setidaknya bisa membuka satu ruang diskusi dan upaya akademis untuk mendapatkan satu prototipe kepemimpinan yang apik dalam panggung kepemimpinan di Idonesia termasuk di tingkat lokal seperti Kota

Metro. Dan dari sisi kebaruan (*novelty*) setidaknya ada tiga kebaruan yang menjadikan kajian ini menarik dan unik yaitu dari sisi pendekatan teori kajian fikih Islam dengan konsep kepemimpinan independen dimana pendekatan seperti ini jarang digunakan dalam kajian politik, Kedua, kebaruan dari aspek kontribusi kajian dimana umumnya orang membahas tentang calon yang diusung oleh parpol sedangkan dalam kajian ini justru yang dikaji adalah calon perseorangan apalagi dianalisa dengan pisau kaidah maslahat dalam kajian fikih politik Islam. Ketiga, kebaruan dari aspek relevansi dengan konteks politik Indonesia yang sangat pluralis, multi agama dan keyakinan sehingga pendekatan agama menjadi ciri khusus yang unik, selain juga kajian ini memadukan dua disiplin ilmu yang berbeda, ilmu politik dan ilmu fiqih lalu bertemu pada satu muara kemaslahatan yang simbiosis mutualistik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip fikih "tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah" dalam kepemimpinan Wahdi-Qomaru sebagai pasangan kepala daerah independen di Kota Metro yang diharapkan bisa melahirkan satu role model kepemimpinan untuk demokrasi yang lebih baik kedepan.

## **Kerangka Teori**

### *Calon Walikota Independen*

Calon independen adalah calon yang mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa melalui mekanisme pencalonan partai. Menurut Farah Khalisah, calon independen yang dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah calon perseorangan yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Sederhananya, calon independen adalah seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa disokong oleh parpol alias atas nama diri sendiri. Dasar hukum yang digunakan dalam

rangka menjadi calon perseorangan adalah Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan atas peninjauan terhadap jumlah presentase dukungan calon kepala daerah melalui jalur independen yang mengharuskan melalui 3,5 persen jumlah penduduk yang terkandung dalam Pasal 41 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Khalisah, 2021). Para calon independen hadir di pilkada untuk menunjukkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang kerap didominasi oleh calon dari koalisi partai politik. Hal ini menyebabkan banyak pihak menuntut regulasi agar ada ruang bagi tokoh tertentu yang memiliki kompetensi namun tidak mendapat dukungan dari partai politik. Sulitnya mendapatkan dukungan dari parpol karena biasanya mereka lebih mendahulukan kader sendiri daripada orang lain. Dan faktor lain karena sulit membangun kesepakatan antara calon eksternal dengan elit partai terutama ketika sudah bicara biaya politik dan pemenangan calon.

Dukungan undang-undang dan putusan MK menjadikan calon independen sebagai alternatif pemilihan kepala daerah sekaligus memberi pilihan kepada rakyat sehingga ruang berdemokrasi lebih terbuka. Berdemokrasi pada hakikatnya memberi ruang secara langsung kepada rakyat untuk terlibat aktif dalam proses shifting powers. Argumentasi ini diperkuat pandangan Syamsudin Haris yang mendefinisikan pemilihan umum sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik dan pemilihan pejabat publik melalui pemilihan kepala daerah (Husen, 2023). Karenanya keberadaan seorang kandidat independen tetap tidak bisa berdiri sendiri dalam pemenangan kontestasi karena soliditas tim sukses dan kekuatan jaringan juga menjadi penentu kemenangan. Yohanes sepakat dengan hal ini karena menurutnya komunikasi politik bisa juga dibangun oleh tim sukses kandidat (Bimo, 2021). Begitu juga Jefri, bahwa komunikasi yang disampaikan berupa pesan politik yang di dalamnya terdapat pandangan untuk membujuk atau

mempersuasi seseorang bahkan sekelompok dengan cara lemah lembut, disampaikan dengan berbagai media bisa mempengaruhi orang lain (Jefri, 2021).

Menjadi seorang calon kepala daerah melalui jalur independen bukan perkara mudah namun bukan pula mustahil. Hal ini disebabkan calon independen memiliki berbagai macam keterbatasan baik ruang gerak maupun jejaring sosial sehingga kerap dicap sebagai calon yang sulit menang. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sejak tahun 2017 calon kepala daerah perseorangan (independen) masih cenderung kalah bersaing dengan calon yang didukung oleh parpol. Minimnya jumlah calon independen di pilkada disebabkan syarat dukungan minimal kepada calon yang dianggap memberatkan (Perludem, 2017). Oleh sebab itu, kemenangan Wahdi-Qomaru ini dianggap fenomenal dan capaian politik di luar jalur partai politik yang luar biasa dan bisa menjadi role model untuk pengimbangan monopoli kekuatan elit dan kekuatan sipil murni dalam proses berdemokrasi pada pilkada lokal.

Agus Budi Santoso lebih tegas menyebut ada tiga keterbatasan seorang calon independen dalam kontestasi pilkada diantaranya; tidak memiliki mesin politik untuk bisa mengakses pemilih, keterbatasan pendanaan sehingga tidak banyak calon independen yang bisa menang karena minim dana politik, labil dalam mengatur keseimbangan kekuasaan dengan legislatif sehingga tidak jarang ada calon independen setelah menang dan menjadi kepala daerah akhirnya menjadi pengurus partai tertentu (Santoso, 2017). Kerisauan Agus sudah dibuktikan oleh penelitian Firmansyah pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2020, karena tidak didukung oleh basis dukungan politik yang kuat, ruang kampanye yang terbatas, dukungan elit politik lokal dan nasional yang sangat terbatas calon independen akhirnya kalah (Firmansyah et al., 2022).

Peneliti sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para pengamat diatas bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat seorang calon independen sulit untuk menang atau bahkan tidak mungkin menang. Namun dalam kamus politik, tidak ada yang

mustahil termasuk majunya Wahdi-Qomaru untuk pilkada Metro tahun 2020 silam. Lalu apa yang menjadi sebab utama dari proses politik yang unik ini? Apakah kekuatan Wahdi Qomaru ada pada personal branding dan jejaring sosial yang kuat? Apapun jawaban yang dapat disimpulkan nantinya yang pasti bahwa masyarakat berhadapan besar akan sosok kepala daerah yang bebas dari tekanan politik para elit dan tim sukses, mandiri dan lebih leluasa untuk berpihak kepada rakyat tanpa ada intervensi dari orang-orang yang pernah menanam budi. Mereka berharap kepemimpinan independen bisa mengedepankan agenda masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan (Husen & Muhammad, 2023).

#### *Kaidah Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*

Sebagian besar ulama menyebut bahwa kaidah ini diambil dari ucapan al-Syafi'i dalam kitab al-Umm (Al-Syafi'i, 1973) yang berbunyi: "*Manzilatu al-Waliy mi al-Ra'iyah Manziltu Wali Mali al-Yatim min Malihi*" artinya "kedudukan seorang penguasa terhadap rakyatnya sama seperti kedudukan seorang wali anak yatim atas hartanya." Kaidah ini juga dipertegas al-Sarakhsi dengan redaksi "*Tasharruf al-Imam 'Ala Wajhi al-Nazhr,*" artinya tindakan seorang penguasa harus atas dasar pertimbangan (kemaslahatan) (al-Sarakhsi, 1938). Begitu juga al-'Izz ibn Abdissalam menyebutkan "*Yatasharrafu al-Wulatu wa Nuwabuhum Fima Dzakarnahu min al-Tasharrufat Mimma Huwa al-Ashlahu li al-Maula 'Alaihi Dar'an li al-Dharari wa al-Fasad wa Jalban li al-Naf'l wa al-Rasyad*" yang berarti "para penguasa atau wakilnya harus bertindak atas dasar apa yang lebih maslahat untuk rakyat, menolak kemudharatan dan kerusakan dan mengambil kemaslahatan serta kebaikan" (Abdissalam, 1421). Begitu juga dengan al-Qarafi yang menyebut kaidah ini dengan "*Laa Yatasharrafu Man Walia Wilayata al-Khilafati Fima Dunaha Ila al-Washiyah Illa bi Jalbi Mashlahatin aw Dar'i Mafsadatin*" artinya "siapapun yang menjabat tidak boleh bertindak kecuali atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan" (al-Qarafiy, 1401). Syamsuddin al-Zakrasy al-Hanbali menyebut dengan redaksi "*Tasharruf al-Wali -al-Ab wa Ghairihi- Manuthun bi al-Mashlahah*" artinya, tindakan

seorang yang berkuasa, ayah atau yang lainnya harus berorientasi pada kemaslahatan” (S. al-Zarkasyi, 1423). Terakhir Badruddin al-Zarkasyi al-Syafi’i dengan redaksi “*Tasharrufu al-Imam ‘Ala al-Ra’iyah Manuthun bi al-Mashlahah*” yang bermakna “tindakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan” (M. bin B. al-Zarkasyi, 1405).

Redaksi kaidah fiqhiyah yang digagas Badruddin al-Zarkasyi ini adalah yang paling masyhur dan banyak dipakai ulama seperti al-Suyuthi, Ibnu Nujaim, Ibnu Hajar al-Haitsami, Syamsuddin al-Ramli, Ala’uddin al-Hashkafi, Mustafa al-Khadimi dan Ibnu ‘Abidin seperti yang ditegaskan oleh Dr. Quthub al-Raisuniy dalam kitabnya ‘*Qa’idah Tasharruf al-Imam Manuthun bi al-Mashlahah wa Tathbiquha al-Mu’ashirah fi al-Majal al-Bi’iy* (al-Raisuniy, 2011).

Adapun uraian makna kaidah, kata *tasharruf* dalam Lisanul ‘Arab mengandung arti mengembalikan, mengosongkan, memberikan sesuatu, dan menghiasinya (Manzhur, 1419). Sedangkan makna *tasharruf* menurut istilah fuqaha’ adalah setiap sesuatu yang keluar dari seseorang atas dasar keinginan sendiri baik berupa ucapan maupun perbuatan yang memiliki dampak hukum tertentu baik yang bermanfaat maupun yang membahayakan dirinya atau orang lain (Zarqa, 1428). Adapun makna kata al-Imam bermakna setiap orang yang diikuti ucapan dan perbuatannya, didahulukan dalam setiap urusan, baik berupa manusia atau benda mati lainnya seperti buku. Namun dalam tradisi ulama fiqih siyasah kata al-Imam berarti setiap orang yang mengatur urusan suatu negara atau kaum serta berusaha menjaga kemasalahatan mereka dan dari makna ini muncul istilah imamah shalat (Ibnu Fariz, 1991). *Al-Ra’iyyah* berasal dari kata *ra’at al-masyiyah* yang berarti ia keluar ke padang rumput sendiri dengan makna asal berupa pengawasan atau penjagaan. Dikatakan penguasa sebagai *ra’yah* karena ia berusaha untuk mengatur urusan orang lain atas dasar kebaikan (Qal’aji & Qutaibi, 1989). Kata *Manuthun* berasal dari *natha yanuthu manathan* yang berarti terikat dan terpaut dengan sesuatu yang lain, *natha fulanun* artinya jika urusan itu disandarkan kepadanya begitu

juga istilah *Dzatu Anwat*, nama sebuah pohon dimana orang musyrik mengagungkan dan menyembahnya dengan cara menggantungkan senjata-senjata mereka padanya (Manzhur, 1419). Adapun kata *mashlahah* berasal dari kata *shaluha*. Ibnu Fariz mengatakan asal kata *shad, lam dan ha'* menunjukkan arti lawan dari kata kerusakan. Sedangkan makna *mashlahah* menurut syariat tidak hanya sebatas setiap yang mendatangkan manfaat semata namun harus diikat dengan batasan manfaat yang diakui syariat. Dari sini para ulama membagi masalah menjadi tiga bagian; *mashlahah mu'tabarah* (yang disandarkan pada sebuah dalil atas penerimaannya), *mashlahah mulghah* (masalahat yang bertentangan dengan dalil sahih) dan yang terakhir *mashlahah mursalah* (setiap masalah yang tidak ada sandaran dalil syariat yang menerima atau menolaknya) (al-Syatibi, 1989). Al-Subki menjelaskan *Kullu mutasharrifin 'an al-ghair fa'alihi 'an yatasharrafa bi al-mashlahah* (Setiap orang yang memiliki wewenang terhadap orang lain hendaknya ia bertindak atas dasar kemaslahatan) (al-Subki, 1991).

Makna global dari kaidah ini sebagaimana disebut Raisuniy bahwa setiap tindakan dari seorang penguasa pada tingkatan apapun maka harus terikat oleh kemaslahatan dan setiap tindakan yang jauh dari kaidah masalahat maka tertolak secara fiqih dan sulit diterima secara politik (al-Raisuniy, 2011).

## **Metode Penelitian**

Kajian ini bejenis riset kualitatif dengan model pendekatan analisis tematik. Sumber berupa wawancara terstruktur, observasi lapangan, telaah dokumen lembaga pemerintah seperti KPUD dan Bawaslu serta non pemerintah seperti lembaga survey dan media masa. Data yang masuk akan dianalisis secara mendalam dan tematik dengan objek formal kaidah fiqih siyasi "*Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlahah*" Kaidah ini menjadi pisau analisis dalam melihat semua kebijakan dan gaya kepemimpinan Wahdi-Qomaru dalam bingkai *tahqiq al-maslahat* (merealisasikan masalahat) yang menjadi inti dari kaidah bahkan menjadi intisari dari fiqih siyasi Islam

dengan mengacu pada empat indikator utama; menolak maju melalui jalur partai, fokus pada agenda masalah masa pandemi, tidak ingin dicalonkan menjadi ketua partai dan terakhir merealisasikan janji kampanye dengan ukiran prestasi yang gemilang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada tokoh utama yaitu Wahdi selaku Walikota terpilih dan Qomru sebagai Wakil Walikota terpilih, selain diperkuat beberapa informan seperti Ketua DPRD, perwakilan Anggota DPRD Metro, Camat Metro Barat, Ketua MUI Metro, tokoh masyarakat dan adat serta perwakilan tokoh pemuda yang ada di Kota Metro.

## Hasil dan Pembahasan

Kemenangan calon independen versus calon dari parpol dalam kontestasi pilkada sejatinya berdampak pada kemandirian kepala daerah terpilih dalam menentukan arah kepemimpinan di daerahnya. Mandiri dalam mengatur, tidak mudah diintervensi apalagi didikte kekuasaan legislatif karena kemenangan pilkada bukan hanya kemenangan proses semata tetapi kemenangan dan kemandirian dalam memimpin sesuai regulasi perundangan yang ada. Kemandirian seorang pemimpin (*al-imam*) dalam menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah merupakan mandat utama dari proses demokrasi yang bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan umum, menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Dalam kamus fiqih siyasah hal ini merupakan inti dari siyasah atau berpolitik itu sendiri dan menjadi ruh serta spirit utama kepemimpinan dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah. Dari kacamata fiqih dan kaidah fiqihyah, sebuah proses kepemimpinan dan khidmat kekuasaan semestinya bermuara pada satu konsep *uniq leadership and moral basic value* seperti yang digagas oleh Imam Badruddin al-Zarkasyi al-Syafi'i yang memunculkan satu kaidah kepemimpinan holistik Islam yaitu kaidah "*Tasharrufu al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlalahah*" yang bermakna "Semua tindakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan"(M. bin B. al-Zarkasyi, 1405). Kaidah ini menempatkan kebaikan publik dan kemaslahatan bersama menjadi tujuan akhir dari sebuah kepemimpinan. Oleh sebab itu,

prinsip kepemimpinan Islam ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dan dikaitkan dengan fenomena kepemimpinan Wahdi-Qomaru di Kota Metro mengingat keduanya merupakan sosok pemimpin yang memiliki terah nasab ulama dan orang yang taat agama.

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana kemenangan Wahdi-Qomaru yang merupakan anomali proses demokrasi lokal di Lampung, khususnya di Kota Metro bukan hanya sekedar kejutan proses shifting power semata tetapi juga bisa memberikan role model dan percontohan baik dalam panggung demokrasi lokal. Yang dimaksud role model dan percontohan itu manakala seorang penguasa bisa memberikan sesuatu yang selama ini dirasa hilang orang rakyat dari penguasa mereka yaitu keberpihakan dalam arti yang seutuhnya.

Ada empat indikator utama sekaligus menjadi tema sentral hasil dan pembahasan kajian yaitu keengganan Wahdi-Qomaru untuk maju pilkada melalui jalur partai politik walau kesempatan terbuka lebar dan banyak partai yang meminta, keduanya lebih mengedepankan program padat maslahat untuk rakyat saat pandemi walau harus sedikit mengorbankan citra politik dan janji perubahan, Wahdi menolak menjadi ketua partai setelah menjabat Walikota yang berbeda dengan para mantan walikota sebelumnya, dan yang terakhir Wahdi-Qomaru memberi bukti terhadap janji kampanye dengan mengukir prestasi gemilang dalam berbagai bidang pembangunan di Kota Metro.

### *Keengganan Wahdi-Qomaru Maju Pilkada Melalui Jalur Partai Walau Kesempatan Terbuka Lebar*

Jauh sebelum proses pilkada Kota Metro tahun 2020 bergulir, masyarakat sudah mendengar dan mengetahui bahwa dr. Wahdi ingin ikut serta dalam bursa pencalonan Walikota. Pada saat yang sama, para elit partai, tokoh masyarakat baik putra asli Kota Metro maupun yang dari luar Metro sudah mulai bersosialisasi dengan memajang spanduk, baliho dan billboard di merata tempat di Kota Metro. Golkar sebagai partai

pemenang pemilu di Metro juga sudah mulai melakukan sosialisasi beberapa tokoh dan pigur calon yang akan dianggap layak jual dan bisa diusung. Dari internal Golkar muncul beberapa tokoh diantaranya; Andi Surya, Djohan (Wakil Walikota saat itu), Ampian Bustami dan beberapa nama lainnya. Begitupun PDIP sebagai partai terbanyak kedua sudah bersosialisasi dari jauh hari terutama oleh tokoh sentral dan mantan Ketua DPRD Anna Morinda, bahkan digadang sebagai calon dengan elektabilitas terkuat. Hal sama dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat memunculkan beberapa nama; Wasis Ruyadi, Nasriyanto, Ahmad Khusaini, dan yang terakhir Mufti Salim.

Dinamika politik dan proses rekrutmen calon kepala daerah saat itu terbilang sengit dan penuh dinamika sampai akhirnya terpilalah tiga kelompok dukungan melalui jalur partai. Kelompok pertama koalisi yang dimotori PDIP bersama PPP, Hanura, Gerindra dan Demokrat dengan mengusung calon Anna Morinda-Fritz Ahmad Nuzir. Kelompok koalisi kedua yang dimotori oleh Partai Golkar bersama PKB dan PAN dengan calon Ampian Bustami-Rudy Santoso. Dan yang ketiga kelompok koalisi PKS bersama Nasdem dengan calon Ahmad Mufti Salim-Saleh Chandra. Dan yang terakhir jalur perseorangan (independen) dimotori oleh dr. Wahdi yang menggandeng mantan Kepala Kemenag Kota Metro Drs. H. Qomaru Zaman.

Bagi Wahdi-Qomaru, untuk meloloskan diri dalam pencalonan jalur independen tidaklah mudah walau namun keduanya diuntungkan oleh letak domisile, jejaring sosial, ketenaran tokoh dan terah warisan nama besar orang tua baik dari dr. Wahdi maupun Qomaru. dr. Wahdi adalah seorang dokter spesialis kandungan yang sudah bertugas lama di Kota Metro sejak tahun 2004. Ayahnya Siradjuddin adalah mantan Plt. Bupati Lampung Tengah dengan Ibukota Metro saat itu. Selain bergerak di bidang kesehatan, dr. Wahdi juga memiliki banyak usaha seperti wahana pemandian dan hiburan, perhotelan, outlet kesehatan, sekolah unggulan, bahkan toko bangunan. Disisi lain, Qomaru Zaman juga merupakan seorang pejabat di Kemenag, tokoh agama, orangtuanya adalah tokoh agama. Dengan memaksimalkan semua jejaring sosial dan

mitra bisnis yang ada akhirnya Wahdi-Qomaru disatukan dalam satu tujuan dan cita-cita yang sama yaitu ingin memajukan Kota Metro melalui jalur politik dan kekuasaan.

Sebenarnya, dr. Wahdi sempat didekati dan ditawarkan oleh banyak partai politik untuk masuk dalam medan kontestasi melalui partai mereka. Setidaknya, Golkar, PKS, Nasdem dan Partai Demokrat sempat menjalin komunikasi dan peninjauan dengan dr. Wahdi namun kesemuanya menemui jalan buntu dan beliau lebih nyaman dengan jalur mandiri apalagi Wahdi juga melihat potensi dirinya cukup memadai walau tidak didukung partai politik.

Proses politikpun terjadi, dan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 masyarakat Kota metro menentukan pilihan politik serta harapan baru mereka dengan menghadirkan sosok kepemimpinan baru di Kota Metro, Wahdi-Qomaru. Berikut ini adalah hasil rekapitan perolehan suara setiap kandidat yang maju saat itu.

Tabel 2. Perolehan Suara Kandidat Pilkada Metro 2020

| No. Urut Calon | Nama Pasangan Calon                      | Jumlah Suara     | Urutan Pemenang |
|----------------|--|------------------|-----------------|
| 1              | Wahdi Siradjuddin-Qomaru Zaman (Wa-Ru)   | 28.294 (29,08%), | Urutan 1        |
| 2              | Ahmad Mufti Salim-Saleh Chandra (Mu-Leh) | 19.158 (19,69%), | Urutan 4        |
| 3              | Ampian Bustami-Rudy Santoso (Ab-Dy)      | 22.819 (23,45%)  | Urutan 3        |
| 4              | Ana Morinda-Ahmad Fritz Nuzir (Aman)     | 27.022 (27,77%). | Urutan 2        |

Dengan kemenangan tipis diatas Wahdi-Qomaru secara resmi ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik menjadi Walikota-Wakil Walikota Metro pada tanggal 26 Februari 2021 (Metrokota, 2020).

Langkah jitu pasangan Wahdi-Qomaru menolak maju kontestasi melalui jalur partai dipandang pengamat lokal sebagai langkah jitu dan ukiran prestasi mengingat banyak contoh kepala daerah yang tersandera oleh jasa politik terhadap tim sukses dan elit partai. Data wawancara peneliti dengan Walikota dr. Wahdi dan Wakil Walikota Qomaru mendapati ada upaya halus melalui aktor politik di Dewan yang mencoba untuk

mengintervensi kebijakan dan gaya kepemimpinan Wahdi-Qomaru. Namun berkat kemahiran Wahdi-Qomaru dalam berkomunikasi dengan para elit dan wakil partai di Dewan, keduanya bisa menjalani masa kepemimpinan keduanya dengan harmonis dan kemitraan sehingga bisa memberi perubahan yang baik di Kota Metro.

Tidak hanya sebatas itu, buah baik dari proses kontestasi yang mandiri dan tidak terikat itu juga berdampak pada pola komunikasi dan hubungan baik diantara Walikota dan Wakil Walikota, pada saat yang sama begitu banyak pasangan kepala daerah yang maju melalui partai politik sudah terlihat pecah kongsi, disharmonis sejak awal kepemimpinan mereka. Hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara tugas sebagai kepala daerah yang harus berjuang keras untuk rakyat dan desakan agenda serta kepentingan parpol sebagai rumah politiknya.

Dalam kasus Wahdi-Qomaru, peneliti mendapatkan banyak data, informasi, bahkan hasil observasi langsung yang menyimpulkan keduanya sangat solid, akur, saling dukung sedari awal bahkan hingga masa akhir jabatan keduanya. Hal ini tentu menjadi unik dan menarik, buah dari sebuah proses kepemimpinan yang mengedepankan prinsip maslahat buat rakyat ketimbang urusan dapur politik dan nafsu kekuasaan semata. Tokoh agama Kota Metro, KH. Abdul Muluk Lc, mengatakan keduanya kompak, peduli terhadap urusan agama, bahkan seorang staf Pemkot menyebut Wahdi-Qomaru kerap membuat sesuatu yang baru termasuk pada bidang syiar keagamaan yang belum dibuat oleh para pendahulunya semisal kegiatan Rakor OPD yang dibuka dengan siraman rohani dari tokoh agama untuk menambah spritualitas para pejabat. Ketua DPRD Kota Metro, H. Tondi Nasution juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, selama ini pola komunikasi dan hubungan antara unsur pemerintah daerah baik eksekutif dengan legislatif adalah baik dan akomodatif. Namun begitu, bukan berarti tidak ada masalah, tetap semua persoalan dilihat dari semua sudut, baik sudut pro-kontra maupun sisi-sisi lain yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan untuk daerah (Nasution, 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Camat Metro Barat Triono, S. Sos menyebutkan bahwa pada awalnya memang ada kendala teknis terkait komunikasi politik antara

Walikota dan Legislatif mengingat beliau adalah maju lewat jalur perseorangan (Triono, 2023) namun itu hanya sebentar dan selanjutnya terjalin begitu harmonis. Wakil Walikota juga menuturkan hal yang sama dimana awalnya, ada rasa saling penasaran, saling lihat dan saling intip, apa gerakan dan gerangan upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak namun semua tetap dalam koridor saling menguatkan, menjadi satu bagian dari pemerintah daerah baik para legislator maupun eksekutor yang dinakhodai oleh Wahdi-Qomaru (Zaman, 2023).

Kekompakan dan soliditas kepemimpinan Wahdi-Qomaru saat memimpin Kota Metro adalah buah baik dari sebuah proses kontestasi murni dan tidak berhutang budi kepada kelompok politik dan elit manapun. Keduanya hanya berhutang budi dan menaruh janji kepada masyarakat untuk maju bersama menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut analisa Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani, calon independen lebih dekat dengan masyarakat, dan jauh dari politik transaksional seperti halnya calon jalur partai (Ratnawati, 2019). Dan dampak baik dari kemandirian calon perseorangan dalam pilkada salah satunya terlihat dari soliditas kepemimpinan sehingga keduanya bisa lebih fokus pada kemaslahatan masyarakat ketimbang memikirkan agenda partai dan keuntungan elit pendukung. Dalam perspektif kaidah *fiqhiyah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* tentu sangat relevan dan sejalan karena berlabuhnya Wahdi-Qomaru dalam perahu perseorangan saat pencalonan secara filosofis bermakna menghindari mafsadah intervensi elit dan partai politik menuju maslahat kemandirian proses kontestasi.

#### *Mengutamakan Program Padat Maslahat Bagi Rakyat Saat Pandemi Ditengah Tuntutan Pencitraan politik*

Beban berat yang ada di pundak Wahdi-Qomaru terasa semakin berat manakala keduanya ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi Kota Metro disaat dunia sedang dilanda pandemi Covid 19. Negara sedang sulit, masyarakat menderita bahkan banyak yang kehilangan saudara, dan APBN-pun juga terjadi pergeseran dan perampangan.

Sederhananya, jangankan mahu melangkah jauh, bertahan saja sudah hebat, jangankan mahu mengukir sejarah baru, mempertahankan yang sudah ada saja adalah sejarah. Bagi Wahdi-Qomaru hal paling berat adalah menyusun langkah dan strategi jitu untuk bisa bertahan dari pandemi, keluar dengan selamat dan membuat terobosan baru untuk membawa masyarakat Metro lebih ceria dan bahagia.

Disisi lain, Wahdi-Qomaru saat berkampanye sudah memberikan harapan dan janji manis kepada masyarakat yang sudah tentu setelah keduanya menjadi pemimpin akan ditagih warga. Sembilan janji Wahdi-Qomaru saat kampanye dijadikan sebagai sembilan program prioritas Wahdi-Qomaru adalah: Pertama, gratis iuran BPJS kelas 3 dengan pelayanan berkualitas yang saat ini sudah direalisasikan oleh Wahdi-Qomaru dengan peningkatan layanan masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (satu kartu banyak manfaat). Kedua, siaga kesehatan warga dan mobil ambulance jenazah gratis dan sudah direalisasikan menjadi peningkatan insentif bagi pegiat keagamaan, pendidikan, kesehatan dan para pamong. Ketiga, kartu sembako murah dan sudah direalisasikan menjadi pembebasan iuran BPJS kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas. Keempat, bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian bagi petani dan sudah direalisasikan dengan pemberian bantuan alat pertanian. Kelima, pembebasan iuran komite sekolah dan sudah direalisasikan menjadi layanan masyarakat terpadu dan cepat, melalui Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat). Keenam, pemberian beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, guru dan dosen serta pemberian tunjangan kinerja guru. Ketujuh, rembuk warga nemui nyimah antar warga dan umat beragama, revitalisasi aktivitas milenial serta penyelenggaraan even budaya secara rutin dan saat ini sudah direalisasikan menjadi program revitalisasi fasilitas olahraga dan budaya. Kedelapan, peningkatan pemberian tunjangan atau insentif bagi pamong, linmas, kaum, pengurus rumah ibadah, penggali kubur dan kader kesehatan dan sudah direalisasikan dengan bantuan insentif langsung. Dan yang terakhir, seluruh jalan mulus, kelurahan terang dan bebas banjir dengan program utama membangun *Creative-Hub*, yaitu sentra produksi

dan pemasaran e-commerce di 5 (Lima) Kecamatan dan 22 (Dua puluh dua) Kelurahan (Ghiffary, 2022).

Pada masa awal kepemimpinan Wahdi-Qomaru semua kebijakan politik dan anggaran bertumpu pada upaya penyelamatan nyawa warga dari bahaya Covid 19 sehingga posisi *refocusing* benar-benar menjadi fokus dan arah kebijakan. Menurut penuturan dr. Wahdi, sejak semula ia sudah menghibahkan diri dan semua prestasinya di bidang kesehatan, baik sebagai ASN, dosen, assesor kesehatan, konsultan medis, bahkan pusat praktik pribadinya AMC Medical Center semuanya ia tinggalkan demi mengabdikan kepada masyarakat dalam bingkai Kepala Daerah. Dan atas kerja keras Wahdi-Qomaru Kota Metro menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI secara simbolis diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian dan diterima oleh Walikota Metro dr. Wahdi S, Sp. OG (K). Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia yang berhasil mencapai jaminan kesehatannya menyeluruh bagi masyarakat di wilayah pemerintah daerah setempat. Kota Metro telah mencapai Jaminan Kesehatan Semesta UHC per 1 Desember 2021. Pencapaian ini diharapkan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro bisa memberikan Pelayanan Kesehatan yang terus semakin meningkat sehingga mencapai indeks mutu pelayanan rumah sakit yang prima (RSUAY, 2023). Bagi Wahdi-Qomaru, menjaga kemaslahatan jiwa dan kesehatan warga jauh lebih penting dari semuanya. Agenda *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al'irdh* (menjaga kehormatan) menjadi titik fokus sesuai dengan bingkai kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* walau terkadang juga tetap berdampak terhadap citra politik pada bidang pembangunan fisik dan lainnya. Dalam wawancara peneliti dengan beliau berkali-kali Wahdi menegaskan bahwa dengan jalur independen dia bisa lebih leluasa untuk menerapkan konsep kepemimpinan Islam termasuk kaidah fiqihyah tentang *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*.

Ada dua problem yang dihadapi oleh seorang kepala daerah independent seperti halnya Wahdi-Qomaru yaitu bagaimana upaya cepat dalam bingkai 100 hari kerja untuk

mewujudkan janji-janji kampanye. Dan kedua, bagaimana langkah-langkah komunikatif, akomodatif dari Walikota-Wakil Walikota untuk membangun citra politik baik di depan publik Metro maupun para mantan competitor dan elit partai pengusung yang dikalahkan dalam proses kontestasi. Menurut Amru, inilah dua problem besar yang dihadapi oleh kepala daerah independen, sehingga mereka kerap tidak menarik simpatik masyarakat (Atalsa & Zubaidah, 2023). Jika menangpun, biasanya seorang cakada independen yang menang akan segera merapat kepada parpol dominan parlemen bahkan terkadang mencalonkan diri menjadi Ketua parpol di daerah tersebut. Uniknya Wahdi-Qomaru, keduanya tidak bergeming dan merubah pendirian, tetap mandiri, tidak berafiliasi ke parpol dan fokus mengurus kepentingan rakyat sehingga seakan terlihat abai pencitraan di depan parpol dan elit namun padat masalah di depan rakyat (Husein dkk, 2023).

#### *Menolak Tawaran Menjadi Pimpinan Partai Politik Setelah Menjabat Namun Tetap Dekat Dengan Politisi*

Menjadi seorang kepala daerah merupakan satu jabatan politik yang sangat strategis apalagi pada satu wilayah yang masyarakatnya melek politik. Implikasinya, posisi strategis ini sering diincar para elit parpol, ada upaya lobi dan penawaran kepada kepala daerah berkuasa untuk memimpin partai tertentu di daerah tersebut. Hasil wawancara dengan Wahdi-Qomaru mendapati keduanya juga pernah ditawari menjadi pengurus partai di Kota Metro namun Wahdi menolak. Bagi Wahdi, andai menerima tawaran tersebut bukanlah satu hal baru dalam kamus politik lokal Metro apalagi nasional karena begitu banyak contoh yang ada. Namun jika tidak menolakupun sejatinya Wahdi-Qomaru sejak awal pencalonan sudah tidak mahu maju melalui jalur partai. bagi Wahdi, tidak menerima tawaran para elit pusat atau provinsi untuk menjadi ketua parpol di Metro tidak masuk agenda utama dan menjadi bagian dari langkah prioritas saat itu. Ia lebih fokus mengurus dan melayani masyarakat Metro yang sudah lama menantikan perubahan dan perbaikan.

Tiga tahun lebih Wahdi-Qomaru memimpin Kota Metro keduanya masih terlihat solid, bersih dari tarik ulur arus elit partai politik. Informasi yang didapat peneliti menyebutkan beberapa parpol sempat menawarkan jabatan pimpinan daerah kepada Wahdi namun beliau tidak menerima dan tegas menolak dan merasa sudah nyaman dengan jalur independen. Wahdi justru mendorong iparnya Efril untuk menjadi bendahara partai Nasdem Kota Metro, mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan berhasil masuk DPRD Kota Metro 2024-2029. Sementara Drs. H. Qomaru Zaman (Wakil Walikota) sempat diusulkan memimpin partai Perindo Kota Metro namun setelah dikonfirmasi peneliti, beliau mengakui sebagai konsultan saja dan sudah nyaman menjadi salah satu Anggota Dewan Pakar DPW PKS Lampung.

Keengganan Wahdi-Qomaru bergabung dengan parpol sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pengamat mengingat keduanya masih hijau di pentas politik praktis. Namun dalam wawancara dengan dr. Wahdi, secara tegas menyatakan tidak ada yang menghambat arah kebijakan politiknya bahkan menurutnya ia bebas melakukan apapun untuk kemaslahatan rakyat (Sirojuddin, 2023). Hal ini juga ditegaskan Wakil Walikota, “kami bebas melakukan sesuatu yang kami anggap berpihak kepada masyarakat, tidak ada yang perlu ditakutkan, kemana saja kami bebas. Namun menurutnya, ada sisi lemah yang dimiliki oleh Walikota independen yaitu keduanya selalu jadi sorotan mata mitra pemerintah daerah, kerap diintipin, dicari sisi lemahnya, ada juga yang berharap kami tidak terlalu kuat, bahkan tidak boleh lama-lama bersatu dan solid (Zaman, 2023a).

Gaya kepemimpinan independen yang ditunjukkan Wahdi-Qomaru diakui Tondi Nasution (Ketua DPRD Metro) cukup baik, komunikatif dan akomodatif. Menurut Tondi, DPRD Kota Metro-pun tidak pernah memandang calon independen adalah lawan, tetapi tetap sebagai mitra dan bagian dari unsur pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemerintahan Daerah (Nasution, 2023).

Wahdi-Qomaru sepakat bahwa bergabung dengan salah satu partai politik apalagi menjadi ketua partai tertentu bisa membuat posisi seorang kepala daerah

semakin kuat dan tidak mudah digoyah. Namun menurutnya, keterlibatan seorang kepala daerah dalam kepengurusan satu partai politik bisa membuat seorang seseorang terjebak nepotisme, mendahulukan kepentingan partai daripada masyarakat dan bisa menghilangkan fokus kerja. Atas dasar inilah Wahdi-Qomaru tetap lebih memilih berlabuh hingga akhir dengan perahu non-partisan dan melihat *tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* akan lebih mudah diwujudkan. Namun begitu, keduanya tidak menjauh dari para wakil rakyat di parlemen apalagi mengambil sikap apatis terhadap wakil rakyat. Keduanya tetap dekat, menjalin hubungan baik bahkan dalam banyak kesempatan Wahdi-Qomaru kerap berdiskusi dan menjalin hubungan dengan anggota dewan baik secara formal maupun non kedinasan. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota Dewan aktif di Kota Metro, Wahdi dianggap tetap dekat dengan Anggota DPRD Kota Metro.

#### Merealisasikan Janji-Janji Kampanye Melalui Prestasi Kerja di Berbagai Sektor

Diantara indikator keberhasilan kepemimpinan Wahdi-Qomaru dalam mengimplementasikan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* adalah dengan upaya sungguh untuk mewujudkan janji-janji kampanye. Diantara fokus kerja Wahdi-Qomaru adalah pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pembangunan sosial budaya masyarakat dan siar keagamaan.

Pada bidang tata kelola pemerintahan, kerja keras Wahdi-Qomaru berhasil menempatkan Kota Metro sebagai Kota dengan serapan anggaran tertinggi nasional dana APBD tahun 2022 (Yus, 2023a). Wahdi-Qomaru juga berhasil meraih penghargaan atas prestasi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro sebesar 77,89% dan menjadi yang tertinggi di Lampung serta pertumbuhan ekonomi di Kota Metro yang berada di posisi 4 untuk tingkat kabupaten, kota se-Provinsi Lampung. Hal ini juga diakui dan diaminikan oleh Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Nasution yang selalu siap bekerjasama dan mendukung upaya-upaya pembangunan daerah Pemkot Metro agar

dapat mewujudkan visi dan misinya (Yus, 2023e). Wahdi-Qomaru juga berhasil menempatkan Metro sebagai kota dengan tata kelola terbaik se-Provinsi Lampung (BRS, 2023a).

Selain memiliki keunggulan pada bidang tata kelola pemerintahan, Wahdi-Qomaru juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan fisik anak. Kepedulian keduanya mendapat apresiasi dari Seto Mulyadi. Kekaguman Seto terhadap keseriusan Wahdi-Qomaru muncul atas terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) tentang hak anak di Kota Metro (BRS, 2023a). Wahdi-Qomaru juga berusaha mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok dengan menerbitkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dengannya Walikota Wahdi mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 Juni 2023 di Jakarta (BRS, 2023b).

Wahdi-Qomaru juga mendapat apresiasi dan penghargaan atas kinerja mereka berdua pada bidang pengendalian jumlah penduduk. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) memberikan penghargaan “Manggala Karya Kencana” kepada Walikota Metro, dr. Wahdi Siradjuddin, Sp. OG (K), M.H. Penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. Penghargaan Manggala Karya Kencana ini, diberikan atas wujud komitmen serta kepemimpinan dalam menggerakkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, serta Percepatan Penurunan Stunting untuk Terwujudnya Keluarga Berkualitas Bahagia dan Sejahtera. Penyerahan Penghargaan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Menko PMK RI Muhadjir Effendy di Griya Agung, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan, Selasa 4 Juli 2023 di Acara Gala Dinner Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30 (Yus, 2023d).

Pada bidang kesehatan, nampaknya Wahdi-Qomaru benar-benar fokus dan membuat banyak kebijakan sehingga capaian penghargaan didapat dari beberapa aspek lain semisal penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI. Penghargaan

ini diserahkan secara simbolis langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian. Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia yang capaian jaminan kesehatannya menyeluruh bagi masyarakat di wilayah pemerintah daerah setempat. Pemberian penghargaan ini dilakukan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, 14 Maret 2023. Jaminan Kesehatan Semesta Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Untuk diketahui, bahwa Kota Metro telah mencapai Jaminan Kesehatan Semesta UHC per 1 Desember 2021 (Yus 2023c, 2).

Wahdi-Qomaru juga mendapat penghargaan atas capaian lainnya dibidang kesehatan seperti Metro bebas Frambusia. Atas capaian membebaskan Kota Metro dari Frambusia, Walikota Metro, dr.H. Wahdi Siradjuddin, Sp. OG(K), M.H meraih penghargaan sebagai kota bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Budi Gunawan Sadikin pada tanggal 21 Februari 2023 di Bandar Lampung (Yus, 2023b).

Walikota Metro Wahdi juga menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Pembangunan, yang diberikan oleh Surat Kabar Harian Lampung One bersamaan dengan acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 media tersebut, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, pada hari Selasa 9 November 2021. Penghargaan tersebut diberikan kepada Walikota Metro atas pencapaian lima program prioritas untuk 100 hari pertama masa pemerintahan pasangan Wahdi-Qomaru sebagai Walikota dan Wakil Walikota Metro. Kelima program prioritas tersebut yaitu Bantuan Sosial Lansia, Santunan Rumah Yatim Piatu, Insentif Rumah Ibadah, Fasilitas Pernikahan di Balai Nikah, dan Santunan Kematian, yang dinilai secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Wahdi menyampaikan bahwa keseluruhan program tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19, serta meringankan beban masyarakat di Kota Metro selama masa pandemi (AGR, 2021).

Selain prestasi luar biasa yang sudah ditorehkan oleh Wahdi-Qomaru dalam memajukan Pembangunan fisik-non fisik Kota Metro, keduanya juga terlihat sangat progressif dalam hal peningkatan layanan publik seperti munculnya gagasan mall pelayanan publik yang berpusat di Gedung Sesat. Diantara terobosan yang dibuat oleh Wahdi-Qomaru di bidang pangan untuk menstabilkan harga dan memantau perkembangan ekonomi warga adalah memunculkan pusat informasi Bapok (Bahan Pokok) yang dirilis melalui website Dinas Perdagangan Kota Metro.

Wahdi-Qomaru tidak hanya menata persoalan ekonomi, Pendidikan, keamanan, budaya dan layanan publik lainnya. Namun Wahdi- Qomaru juga menunjukkan tajinya pada kepedulian di bidang keagamaan semisal prestaso gemilang Kafilah Metro pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-49 Tahun 2022 sebagai Juara Ke-2 dan pada MTQ Provinsi Lampung yang ke 50 Tahun 2023 Metro keluar sebagai juara ke-3. Ini sungguh capaian yang luar biasa dan karena memang didukung oleh komitmen LPTQ Metro dibawah komando Qomaru Zaman (Wakil Walikota) dan dukungan penuh Walikota dr. Wahdi yang belum dicapai oleh beberapa pemimpin Metro sebelumnya.

Dan yang terakhir, Wahdi-Qomaru memandang bahwa kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi agama. Hal ini diyakini oleh keduanya sebagai sebuah prinsip dalam memimpin sehingga beberapa kebijakan dibuat untuk memastikan syiar agama tegak di Metro seperti kajaian rutin aparaturn Pemerintah Kota Metro baik di kantor Walikota, Rumah Dinas, Masjid Agung Taqwa dan kajian keliling Safari Ramadhan dan Hari Besar Islam dan tidak kalah hebatnya keterlibatan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan solat jum'at di beberapa masjid yang rawan di Kota Metro.

Itulah empat indikator keberhasilan Wahdi-Qomaru dalam menjalan roda pemerintahan yang mandiri dan bebas dari tekanan politik, elit partai dan politik balas budi. Gaya kepemimpinan ini sangat terkait dan pemahaman kegamaan keduanya tentang prinsip politik Islam dan juga ilmu fiqih yang diwarisi dari sang kakek Sulaiman Rasyid si penuli buku Fiqih Islam fenomenal itu. Penerapan kaidah fiqihyah *tasharruf al-*

*imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* dapat dijalankan dengan baik oleh Wahdi-Qomaru sehingga keduanya bisa melahirkan banyak prestasi di bidang tata kelola pemerintahan selain juga apik di mata para lawan termasuk elit partai.

Keberhasilan Wahdi-Qomaru dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Metro berkah dari sebuah kontestasi pilkada dengan jalur perseorangan atau independen tentu menjadi satu bentuk percontohan baik untuk daerah lainnya dalam hal kemandirian dan keyakinan diri seorang kandidat dalam sebuah pesta demokrasi. Kemenangan tidak selamamnya identik dengan persiapan anggaran besar dan tidak pula selalu didukung oleh kekuaran partai besar. Hal ini semakin memperbesar harapan masyarakat akan lahirnya sosok pemimpin baik di level lokal maupun nasional yang bisa lebih mandiri dan tidak terlilit drama balas budi politik yang biasa disaksiskan di banyak tempat. Keberhasilam Wahdi-Qomaru dalam meramu pola komunikasi dan gaya kepemimpinan ala politik Islam semakin menguatkan keduanya untuk maju dalam tahapan pilkada berikutnya bahkan survey saat ini (2023) menunjukkan belum ada lawan tanding yang bisa mengimbangi keduanya, ada banyak partai sudah merapat untuk kontestasi 2024 walau semua kemungkinan masih bisa terjadi.

## **Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penggalian dan telaah serta analisis mendalam terhadap data yang ada dari lapangan serta dokumen terkait objek penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah utama penelitian maka dapat disimpulkan bahwa walikota independen adalah sebutan atas seorang kepala daerah yang saat maju dalam pencalonan pada pilkada tanpa melalui mekanisme usulan partai politik, maju secara perseorangan dengan segala syarat dan tahapan yang ada. Sebutan perseorangan atau independen itu dilekatkan pada saat ia mencalonkan diri dalam pilkada dan tahapan proses pemiliha saja. Dan Ketika seorang calon perseorang sudah memenangkan pilkada dan dilantik menjadi kepala derah baik Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,

Gubernur/Wakil Gubernur maka penyebutan itu tidak ada dan statusnya sama sebagai Kepala Daerah Definitif dengan kuasa penuh sesuai aturan undnag-undang.

Pasca pemungutan suara pilkada serentak Kota Metro tanggal 9 Desember tahun 2020 calon independen (Wahdi-Qomaru) memenangi kontestasi, mengalahkan perolehan calon yang diusung partai politik. Paslon nomor urut 1 (Wahdi-Qomaru) mendapatkan perolehan suara 29,2% disusul terbanyak kedua diraih paslon nomor urut 4, Anna Morinda–Fritz Akhmad Nuzir sebanyak 27,6% dan diurutan ketiga paslon nomor urut 3, Ampian Bustami–Rudy Santoso sebanyak 23,2% dan yang terakhir paslon nomor urut 4 Ahmad Mufti Salim–Saleh Chandra sebanyak 20,0%.

Wahdi-Qomaru berhasil memberikan satu percontohan baik dalam politik praktis terutama pada level Kota Metro dengan membuat role mode kepemimpinan yang berlandaskan konsep atau prinsip fikih dengan mengacu pada kaidah Tasharruf al-Imam ‘Ala al-Ra’iyah Manuthun bi al-Mashlahah. Keberhasilan Wahdi-Qomaru dalam mengimplementasikan prinsip fikih politik ditas diwujudkan dalam empat indikator tematik yaitu keengganan Wahdi-Qomaru untuk maju dalam kontestasi melalui jalur partai, mengedepankan program padat maslahat walau tidak populis di saat keduanya butuh citra politik dan recovery pasca kontestasi, Wahdi-Qomaru menolak tawaran menjadi pengurus partai politik, dan yang terakhir Wahdi-Qomaru mewujudkan janji politik dengan prestasi kerja dan karya nyata. Dari sisi temuan dan kebaharuan penelitian, riset ini telah memberikan satu corak unik kajian dengan memadukan dua disiplin ilmu politik umum dan fikih Islam, menggali ceruk politik lokal dengan mengedepankan pendekatan soft approach ala Wahdi-Qomaru seagai role model untuk model kepala daerah kedepannya.

Pada akhirnya, peneliti menyadari segala keterbatasan yang ada sehingga saran dan kritik membangun selalu dinanti dan diharapkan agar bisa lebih baik lagi kedepan. Ceruk kajian politik lokal masih terbuka lebar apalagi pasca pilkada serentak 2024 dengan fenomena banyaknya calon incumbent yang kalah. Rasa Syukur dan terima kasih peneliti

sampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah menjadi tulang punggung anggaran bagi terlaksananya penelitian ini pada tahun 2023.

## Referensi

- Abdissalam, Izzuddin bin. 1421H. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. 2nd ed. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Adhithia, Fitang Budhi. 2020. "Sejarah Dan Kisah Sukses Calon Independen Di Pilkada Indonesia." <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhithia/sejarah-dan-kisah-sukses-calon-independen-di-pilkada-indonesia>, September 8, 2020.
- AGR, AGP. 2021. "Walikota Metro Terima Penghargaan Tokoh Penggerak Pembangunan." *Metrokota*, November 9, 2021. <https://info.metrokota.go.id/>,
- Ahmad Khusaini. 2022. *Perkembangan Politik Metro*.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1973. *Al-Umm*. 3rd ed. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- atalsa, Amrul, and Ida Zubaidah. 2023. "Strategi Politik Calon Independen Dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2024 Di Kotamadya Sibolga: Studi Pemenangan Pasangan Achmad Sulhandan Edwad Siahaan." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 23 (1). <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/145/129>.
- Bimo, Yohanes De Britto, dkk. 2021. "Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*. 5 (1).
- BRS, Yus. 2023a. "Wahdi Diberikan Penghargaan Sebagai Walikota Sahabat Anak Oleh Kak Seto." *Metrokota*, June 4, 2023. <https://info.metrokota.go.id/wahdi-diberikan-penghargaan-sebagai-walikota-sahabat-anak-oleh-kak-seto/>.
- . 2023b. "Wahdi Terima Penghargaan Dari Kemenkes Di Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023." <https://info.metrokota.go.id/wahdi-terima-penghargaan-dari-kemenkes-di-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2023>.
- . 2023c. "Walikota Metro Wahdi Terima Penghargaan PPD Sabuari, 2023," March 29, 2023. <https://info.metrokota.go.id/walikota-metro-wahdi-terima-penghargaan-ppd-saburai-2023/>.
- Budi Santoso, Agus. 2017. "Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilu Dintinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015." *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2).
- Firmansyah, Joni, Dedi Supriadi, Aldi Apriansyah, and M.Arif Rahman. 2022. "Upaya Calon Kepala Daerah Jalur Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020." *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5 (12). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3120490&val>.
- Ghiffary, Muhammad. 2022. "Sembilan Program Prioritas Pemkot Metro, Salah Satunya Semua Jalan Mulus." <https://lampung.tribunnews.com/>, Oktober 2022. <https://lampung.tribunnews.com/2022/10/31/sembilan-program-prioritas-pemkot->

- metro-salah-satunya-semua-jalan-mulus?page=2.
- Hawari, Nadirsah. 2020. *Sulthah Tasyri'iyah Perspektif Trias Politik Islam Dan Demokrasi Kontemporer*. Jogjakarta: CV. Agree Media Publishing.
- <https://Info.Metrokota.Go.Id/>. 2020. "Wahdi-Qomaru Resmi Menjadi Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Metro," Desember 2020.  
<https://info.metrokota.go.id/wahdi-dan-qomaru-resmi-menjadi-walikota-dan-wakil-walikota-terpilih-kota-metro/>.
- <https://Perludem.Org/>. 2017. "PERLUDEM: Calon Independen Sulit Bersaing Dengan Parpol," November 30, 2017. <https://perludem.org/2017/11/30/perludem-calon-independen-sulit-bersaing-dengan-parpol/>.
- Husein dkk, Najib. 2023. "Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020." *Journal Publicuho* 16 (1). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.93>.
- Husen, Najib. 2023. "Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020." *Journal Publicuho* 6 (1). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.93](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.93).
- Husen, Najib, and La Ode Muhammad. 2023. "Analisis Potensi Calon Independen Versus Calon Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan." *Jurna; Publicuho* 6 (1). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.93>.
- Ibnu Fariz, Ahmad. 1991. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Jail.
- Jefri, Emelsi. 2021. "Strategi Komunikasi Amran Mahmud Dalam Kemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wajo 2019-2024." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4 (1).
- Khalisah, Farah. 2021. "Independent Candidates Capable or Not?" FH UI, 2021. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2457-2/>.
- Manzhur, Ibnu. 1419. *Lisan Al-'Arab*. Vol. 3. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Islamiy.
- Nasution, Tondi. 2023. *Gaya Komunikasi dan Probeltamtika Walikota Independen*.
- Perludem, Admin. 2017. "UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota." <https://Perludem.Org/2017/11/30/Undang-Undang-Tentang-Pemilihan-Kepala-Daerahpilkada/>.
- Purna Jaya, Tri. 2020. "Pilkada 2020 Kota Metro Lampung, Calon Perseorangan Ungguli 3 Calon Dari Parpol." <https://Regional.Kompas.Com>, Desember 2020.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas, and Hamid Qutaibi. 1989. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. Vol. 1. Baerut: Dar al-Nafa'is.
- Qarafiy, Syihabuddin al-. 1401. *Al-Furuuq*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Raisuniy, Quthub al-. 2011. "Qa'Idah Tasharruf al-Imam Manuthun Bi al-Mashlahah Wa Tathbiquha al-Mu'ashirah Fi al-Majal al-Bi'iy." *Majallah 'Ilmiyah Muhakkamah*, Qatar University, 2011.
- Ratnawati, Evi. 2019. <https://Kepri.Antaraneews.Com/>, Desember 2019.  
<https://kepri.antaraneews.com/berita/60727/calon-independen-diyakini-pengamat->

membawa-dampak-positif.

- RSUAY, Humas. 2023. "Masyarakat Kota Metro 99% Telah Menggunakan BPJS Kesehatan." Metrokota, Agustus 2023. <https://Rsuay.Metrokota.Go.Id/>, Agustus 2023.
- Santoso, Agus Budi. 2017. "Eksistensi Dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015." Refleksi Hukum 1 (2).
- Sarakhsi, Syamsuddin al-. 1938. Al-Mabsuut. 3rd ed. Vol. 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sirojuddin, Wahdi. 2023. Eksistensi dan Problematika Walikota Independen Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kepemimpinan Wahdi-Qomaru di Kota Metro)Interview.
- Subki, Abdul Wahhab al-. 1991. Al-Asybah Wa al-Nazha'ir. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Syambudi, Irwan. 2020. "Calon Independen Pilkada Bertumbuhan, Demokrasi Dikuasai Oligarki." <https://Tirto.Id/Calon-Independen-Pilkada-Bertumbuhan-Demokrasi-Dikuasai-Oligarki-F8no>, September 14, 2020.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. 1989. Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah. Saudi Arabia: Maktabah Riyadh al-Haditsah.
- Triono. 2023. Walikota Independen dan Pembangunan Metro.
- Yus, BRS. 2023a. "Wahdi Terima Penghargaan APBD Award 2023 Dari Kemendagri." Metrokota, March 16, 2023. <https://Info.Metrokota.Go.Id/>, March 16, 2023. <https://info.metrokota.go.id/wahdi-terima-penghargaan-apbd-award-2023-dari-kemendagri/>.
- . 2023b. "Wahdi Terima Penghargaan Kota Bebas Frambusia." Metrokota, February 21, 2023. <https://Info.Metrokota.Go.Id/>, February 21, 2023. <https://info.metrokota.go.id/wahdi-terima-penghargaan-kota-bebas-frambusia/>.
- . 2023c. "Wahdi Terima Penghargaan UHC Award BPJS RI." Metrokota, March 14, 2023. <https://Info.Metrokota.Go.Id/>, March 14, 2023. <https://info.metrokota.go.id/47826-2/>.
- . 2023d. "Walikota Metro Terima Penghargaan Kepala BKKBN RI." Metrokota, July 5, 2023. <https://Info.Metrokota.Go.Id/>, July 5, 2023. <https://info.metrokota.go.id/walikota-metro-terima-penghargaan-dari-kepala-bkkbn-ri/>.
- . 2023e. "Walikota Metro Terima Penghargaan PPD Saburai 2023." Metrokota, March 29, 2023. <https://info.metrokota.go.id/walikota-metro-wahdi-terima-penghargaan-ppd-saburai-2023/>.
- Zaman, Qomaru. 2023a. Eksistensi dan Problematika Walikota Independen Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kepemimpinan Wahdi-Qomaru di Kota Metro)Interview.
- . 2023b. Kepala Daerah Independen dan Pembangunan Daerah Metro.
- Zarkasyi, Muhammad bin Badruddin al-. 1405H. Al-Mantusr Fi al-Qawa'id. Vol. 2. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-syu'un al-Diniyah.
- Zarkasyi, Syamsuddin al-. 1423H. Syarh Mukhtashar Al-Khiraqiy. Vol. 2. Bairut: Dar al-

Kutub al-'Ilmiah.

Zarqa, Mustafa. 1428. Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am. Vol. 1. Bairut: Dar al-Fikr.

Zubair. 2021. "Pemilihan Kepala Daerah Bagi Calon Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal DInamika Hukum 12 (1).